BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Organisasi / Instansi pemerintah yang menangani urusan / fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama *Provinciale Veeart Senijkundige Diesnst*, yang berkedudukan di Bandung, dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan Jakarta. Organisasi ini mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal pencegahan / pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak, serta penyediaan kesehatan produk ternak (RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat, dicirikan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan.

Awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah Kementerian Kemakmuran. Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani /

masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan, perikanan darat, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat yang meliputi urusan-urusan : usaha pemasukan bibit ternak dari luar provinsi, Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan di luar provinsi; mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat resmi berdiri, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah. Sementara Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1952.

Tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubah nama / istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan

Presiden tersebut, nomen klatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan, pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah provinsi sebagai Daerah Otonom.

Mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi / dinas-dinas di tingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 jo No 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok, merumuskan kebijakan operasional di bidang peternakan yang

merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.1.2.1 Visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi merupakan suatu kondisi yang ideal tentang masa depan yang mengandung daya tarik untuk suatu organisasi. Visi dapat memberikan semangat dalam melaksanakan tugas dan mengarahkan kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan visi Pemerintah Jawa Barat yaitu “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, maka visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yaitu **”Menjadi Dinas yang memberdayakan masyarakat peternakan demi Ketahanan Pangan asal hewan serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat”.**

Kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk :

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin melalui aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya lokal,
2. Perluasan lapangan kerja berbasis agribisnis peternakan,
3. Meningkatkan produktivitas usaha,
4. Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal.

(sumber : Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009)

Kebijakan pembangunan peternakan Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatnya investasi pada sektor peternakan yang meningkatkan akses Usaha Kecil Menengah (UKM). Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan baru serta mengurangi kemiskinan.

3.1.2.2 Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Misi diperlukan dalam rangka tindak lanjut dari konsep visi. Visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak dapat terlihat lebih nyata pada misi yang ingin dicapai. Pernyataan misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memperlihatkan kebutuhan pelayanan masyarakat dalam peningkatan produk peternakan dan menjaga lingkungan bagi hewan. Misi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut

1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat melalui kemitraan strategis secara profesional;
2. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan produk yang berdaya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan
3. Mendorong peningkatan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(http://www.disnak.jabarprov.go.id)

Misi dinas peternakan provinsi jawa barat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis peternakan melalui peningkatan produksi,

pengolahan sampai peda pemasaran produk ternak. Mempertahankan terciptanya kesehatan hewan dan masyarakat yang bersih.

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi diperlukan dalam memberikan kemudahan dan memberikan kejelasan dalam bentuk kerangka mengenai gambaran berbagai hubungan kerja antara aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat serta menentukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam suatu wadah organisasi. Berikut struktur organisasi di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Struktur organisasi dilihat pada gambat 3.1 yang memimpin Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berarti yang mengatur serta berwenang dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan struktur organisasi dikelola juga oleh sub bagian Kepegawaian dan Umum. Penerapan *e-Government* dalam *situs* *www.disnak.jabarprov.go.id* dikelola oleh bidang prasarana dan sarana di bawah seksi data dan informasi.

3.1.4 Pegawai Negeri Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999). Berdasarkan bunyi tersebut, bahwa sumber daya manusia Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah aparatur negara yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang peternakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Seluruh aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berjumlah 264 orang berdasarkan data yang diperoleh dari Subbagian Kepegawaian dan Umum

pada tahun 2009. Perincian jumlah aparatur berdasarkan pangkat / golongan dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Pangkat / Golongan Aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV/b	10
2.	Golongan IV/a	18
3.	Golongan III/d	30
4.	Golongan III/c	18
5.	Golongan III/b	38
6.	Golongan III/a	19
7.	Golongan II/d	6
8.	Golongan II/c	16
9.	Golongan II/b	4
10.	Golongan II/a	75
11.	Golongan I/c	6
12.	Golongan I/a	24
Jumlah		**264**

Sumber : Dinas Peternakan Subbagian Kepegawaian dan Umum Tahun 2009

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
2. Penyelenggaraan urusan peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
3. Penyelenggaraan failitasi peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, dan pengembangan usaha serta urusan kesekertariatan;

4. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Kewenangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Pertanian di subbidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat 8 (delapan) sub bidang urusan kewenangan penetapan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di wilayah Provinsi antara lain sub sub bidang :

1. Kawasan Peternakan
2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
4. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis
5. Pakan Ternak
6. Bibit Ternak
7. Pembiayaan
8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

(Sumber : Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tahun 2009)

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Jawa Barat merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut

1. Penyelenggara perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi pelaksana kebijakan teknis peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas peternakan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
5. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Sekretariat merupakan unsur pelaksana koordinasi yang bertujuan dalam peningkatan perencanaan dan program dinas. Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum (Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program sekretariat;
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Sekretariat membawahi tiga subbagian dengan tugas dan fungsinya, yaitu *Pertama,* Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program (Peraturan

Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, subbagian perencanaan dan program memiliki fungsi

1. Pelaksana perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan program;
2. Pelaksanan perencanaan dan program dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesaehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
3. Pelaksana penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas;

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Kedua, Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan (Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, subbagaian keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanjan rutin daerah;
2. Pelaksanaan teknis administrasi keuangan.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Ketiga, Subbagian Kepegawaian dan Umum memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan (Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, subbagaian kepegawaian dan umum memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan bahan peyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
2. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
3. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;

4. Pelaksanaan tugas kehumasan dinas;
5. Pengelolaan perlengkapan dinas.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009).

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi bidang prasarana dan sarana peternakan meliputi penataan kawasan, teknologi alat mesin, data dan informasi (Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Bidang prasarana dan sarana dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas penataan kawasan peternakan dan padang penggembalaan;
2. Pengkajian bahan kebijakan teknis operasional penerapan teknologi dan penggunaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
3. Penyelenggaraan pengkajian pengelolaan data statistik dan informasi peternakan.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Bidang Prasarana dan Sarana membawahi tiga seksi yang memiliki tugas dan fungsinya, yaitu *Pertama*, Seksi Penataan Kawasan yang mempunyai tugas pokok meyusun bahan kebijakan teknis operasional penataan kawasan peternakan (Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Seksi Penataan Kawasan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan fasilitas teknis operasional pemanfaatan padang penggembalaan.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Kedua, Seksi Teknologi Alat Mesin mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitas pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan (Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Seksi Teknologi Alat Mesin memiliki fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional teknologi alat mesin;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi teknis operasional pemanfaatan teknologi alat mesin.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

Ketiga, Seksi Data dan Informasi memiliki tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi pengembangan data serta penyediaan informasi bidang peternakan (Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi.

1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional penyajian data statistik peternakan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan sistem informasi peternakan.

(Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2009)

3.2 Gambaran Umum *Situs* *www.disnak.jabarprov.go.id*

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen untuk mengembangkan *situs* sebagai salah satu sarana penunjang dalam memanfaatkan teknologi informasi, termasuk didalamnya beberapa sumber daya (*resources*) yang terkait dengan teknologi informasi, berupa server, aplikasi, *database*, dan perangkat lainnya, seperti *router, firewall* dan *switch*. Menurut Ir. Dade Soedjana Priya yang menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Peternakan Jawa Barat melalui *situs*-nya *www.disnak.jabarprov.go.id* adalah salah

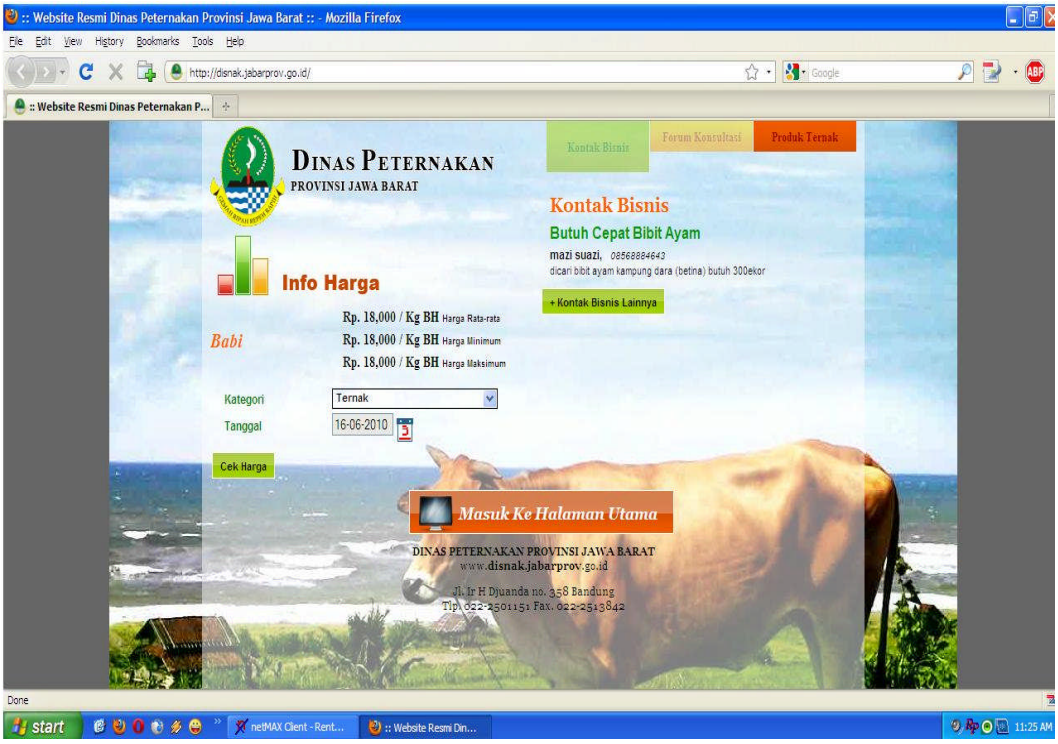
satu sarana atau fasilitas yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dibidang peternakan sebagai bahan informasi dan sebagai bahan komunikasi yang dialogis dengan pengguna data (sumber : *www.disnak.jabarprov.go.id*).

Situs www.disnak.jabarprov.go.id mempermudah masyarakat, kalangan bisnis serta masyarakat luas untuk mengetahui informasi mengenai peternakan dalam satu wadah tanpa dibatasi ruang dan waktu. *Situs www.disnak.jabarprov.go.id* disediakan dalam meningkatkan informasi bagi masyarakat yang diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan dalam mendukung pengembangan pemerintah yang berbasis elektronik.

www.disnak.jabarprov.go.id merupakan sebuah *situs* resmi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. *Situs www.disnak.jabarprov.go.id* dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan anggaran Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. *Situs www.disnak.jabarprov.go.id* di bentuk pada tahun 2005 dan dibuat oleh jasa teknologi yaitu sebagai pihak swasta (pihak k-3) yang bernama BIT (Bentang Inspira Teknologi). Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan perusahaan BIT masih menjadi mitra dalam pengembangan teknologi inspirasi di lingkungan pemerintah. BIT bertanggungjawab mulai dari pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi hingga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. *Situs www.disnak.jabarprov.go.id* di dominasi warna *orange* dan putih yang mempunyai jaringan menggunakan *wire-based* dengan *bandwidth internet* 256 kbps.

Situs *www.disnak.jabarprov.go.id* kembali meraih penghargaan pada ajang bergengsi lomba *situs web* tingkat nasional tahun 2009. Situs Dinas Peternakan Jawa Barat meraih juara 1 untuk kategori SKPD Lingkup Pertanian Provinsi, ini merupakan kemenangan ketiga kalinya yang di raih oleh Dinas Peternakan yaitu pada tahun 2007 dan 2008 dan pada tahun 2006 mendapat peringkat ke II. *Situs* Dinas Peternakan Provinsi Jawa barat mampu bertengger di posisi puncak dengan menyingkirkan Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Timur dan rival se-provinsinya. Lomba *situs* tingkat nasional ini bertemakan "Efisiensi Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Elektronik" yang di selenggarakan secara rutin tiap tahun oleh Departemen Pertanian yang sekarang berubah menjadi Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.2
Tampilan *Situs* *www.disnak.jabarprov.go.id*



(Sumber : *http://disnak.jabarprov.go.id*, 2010)

3.2.1 Konsep *Situs* ***www.disnak.jabarprov.go.id***

Situs Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dikembangkan dengan konsep sebagai berikut :

1. *Single entry for manypurposes.* Inputan (masukan) data dilakukan sekali pada aplikasi *web* internal (Aplikasi *Database* Internal) dan informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi lainnya.
2. *Integrated system.* Data dan alur informasi dikelola secara integral.
3. Data *localization.* Data dikelola secara lokal pada lokasi pengguna data.
4. *Internal bandwidth efficiency*. *Bandwidth* yang tersedia perlu dihemat untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk hal-hal yang penting. Pada umumnya user Dinas Peternakan ingin mengakses *website* dinas, maka dari itu *bandwidth* dinas perlu dihemat dengan cara user mengakses replika *website* yang ada dilokal intranet.
5. *Single Sign On.* Satu *account* untuk untuk bisa mengakses beberapa aplikasi yang terintegrasi. User cukup login satu kali untuk mendapat layanan yang disediakan dari beberapa aplikasi.

(Sumber : *http://disnak.jabarprov.go.id*, 2010)

Aspek Sekuritas Sistem

1. Integritas Data. Data yang ditampilkan terjamin keasliannya. Baik data yang ditampilkan untuk publik maupun data yang bersifat privat.
2. *Confidential*. Data-data yang bersifat privat tetap terjamin kerahasiaannya.

3. Membuka akses *port* server sesuai kebutuhan. Mengurangi ancaman dari tangan *cracker* yang ingin masuk dalam sistem.
4. *Firewall*. Membatasi akses server.
5. *NIDS* (*Network Intrusion Detection System*). Sistem dapat mendeteksi apabila server telah / sedang disusupi.

(Sumber : *http://disnak.jabarprov.go.id*, 2010)

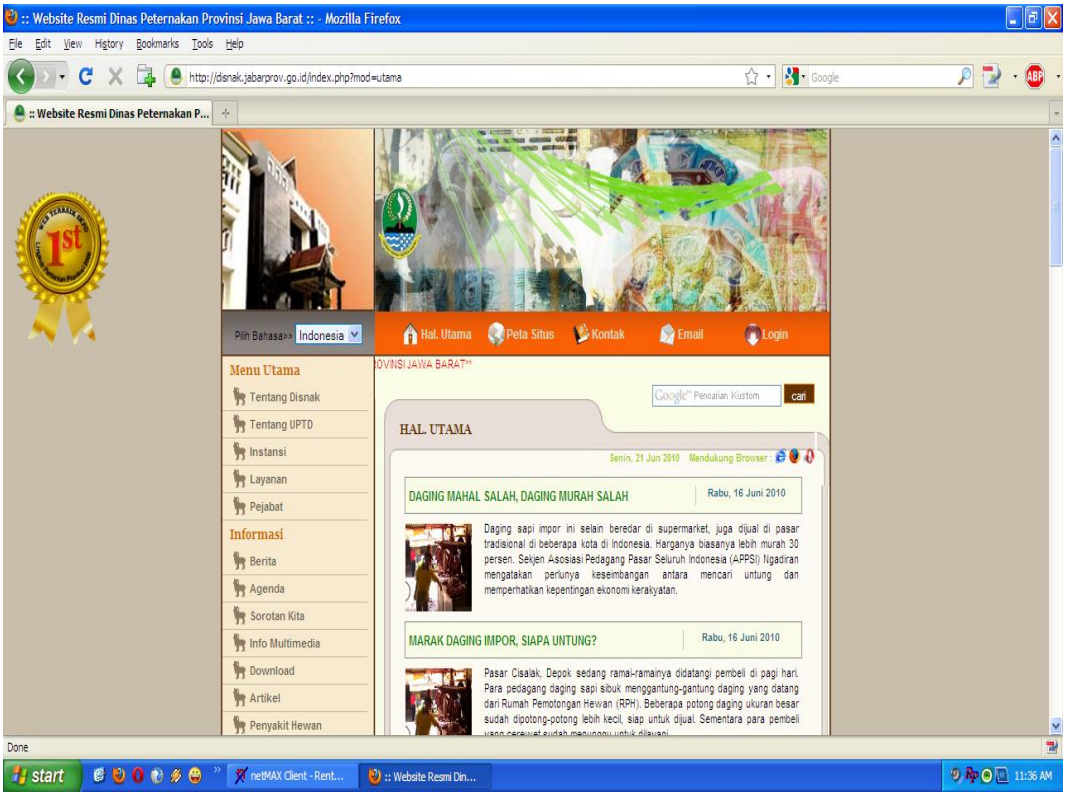
3.2.2 Fitur *Situs www.disnak.jabarprov.go.id*

Situs Resmi Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwakilan dari keseluruhan informasi Peternakan di Jawa Barat dalam bentuk digital. *Situs* ini diperuntukkan untuk masyarakat luas, instansi bisnis dan Pemerintah di Indonesia. *Situs* Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas empat menu utama yaitu :

1. Menu Utama
2. Informasi
3. Ragam
4. Tentang Website

(Sumber : *www.disnak.jabarprov.go.id*)

Gambar 3.3
Halaman Utama *Situs* *www.disnak.jabarprov.go.id*



(Sumber : *http://disnak.jabarprov.go.id*, 2010)

1. Menu Utama

Merupakan menu yang berisikan tentang konten-konten yang lebih bersifat statis dan menampilakan tentang kedinasan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Menu ini menampilkan seluruh informasi tentang Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dari mulai selayang pandang sampai pada struktur organisasi, selain itu terdapat menu tentang UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Instansi terkait, Layanan, dan Pejabat.

2. Informasi

Merupakan menu yang menampilkan informasi sekilas berupa berita dan informasi-informasi yang penting bagi masyarakat luas. Menu informasi ini, data-data yang ditampilkan lebih bersifat dinamis dibandingkan data-data pada menu utama. Informasi dilengkapi dengan gambar bergerak yaitu dalam bentuk film pendek tentang peternakan dan UPTD Dinas Peternakan di Provinsi Jawa Barat. Pada menu ini terdapat informasi-informasi berupa artikel dan arsip yang berkaitan dengan peternakan di Jawa Barat, selain itu terdapat pula informasi berupa Data Statistik, Info Harga, dan sebagainya.

3. Ragam

Ragam merupakan menu yang dapat mengakomodasi transformasi dua arah antara masyarakat luas dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Masyarakat dapat langsung menilai Dinas Peternakan provinsi Jawa Barat melalui menu ini, yang berisikan : Link Terkait, Galeri Foto, Polling, Forum, Buku Tamu, Daftar Istilah, Member *Website* dan Pasokan Berita RSS.

4. Tentang *Situs*

Merupakan menu yang berisi tentang *situs* Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sendiri dari mulai seperti apa konsep yang digunakan, fitur-fitur yang terdapat dalam *website* ini sampai Statistik *Websit*e. Fitur lain yang juga mendukung *situs* Dinas Peternakan Provinsi Jawa barat antara lain

1) *Search Engine* yang Prima

Search Engine situs Dinas Peternakan ini mampu melakukan *searching* keseluruh data yang ada di dalam *website* Dinas Peternakan, hasil yang tampil

seperti melakukan *searching* pada *google*. *Engine* yang digunakan prinsipnya hampir sama seperti yang digunakan pada *google*.

2) Tersedia dalam Tiga Bahasa

Bahasa dalam situs ini terdiri dari tiga bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Daerah yaitu Bahasa Sunda.

3) Navigasi yang berjenjang dan terstruktur.

Navigasi yang terstruktur memudahkan masyarakat untuk melihat setiap menu dan sub menu yang terdapat pada *situs* ini.

4) *Scrolling Text* yang dapat berubah-ubah.

Scrolling Text yang dapat berubah-ubah dapat berisi tentang informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat luas sampai kepada berita yang aktual.

5) *Historical*.

Fasilitas untuk menyimpan setiap data atau informasi yang terdapat pada *website*, hal ini memudahkan masyarakat luas untuk memperoleh data yang diinginkan karena data yang terdapat pada *website* dapat tersimpan dengan baik.

6) *Mail* dan Navigasi menu pada *SiteMap*

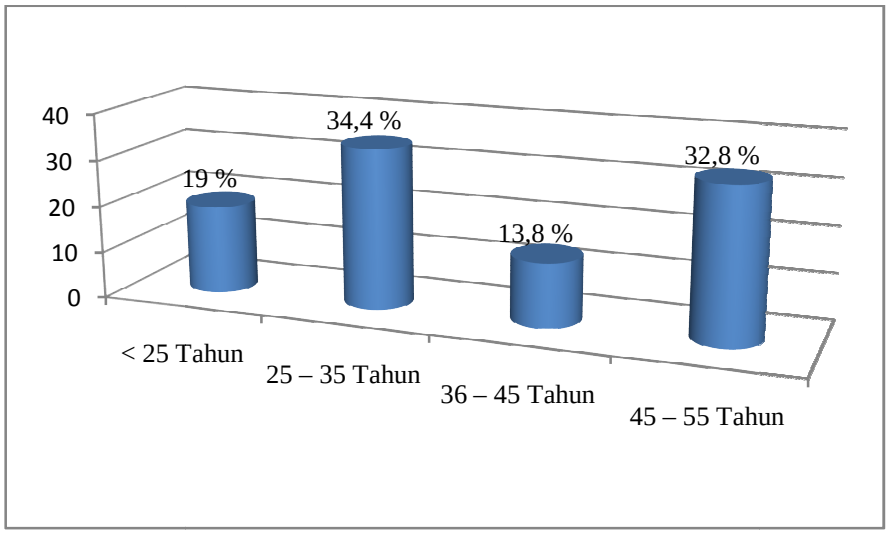
Fasilitas *e-mail* sebagai sarana dalam melaksanakan komunikasi dua arah serta menu navigasi menu untuk melakukan perpindahan dari aplikasi satu ke yang lainnya.

3.2.3 Karakteristik Responden

Responden yang diteliti adalah aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 58 orang berdasarkan golongan IV dan golongan III karena

dianggap mengetahui mengenai *situs* *www.disnak.jabarprov.go.id*, sedangkan profil responden itu sendiri terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan status perkawinan. Berdasarkan hasil dari angket yang peneliti sebarkan dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

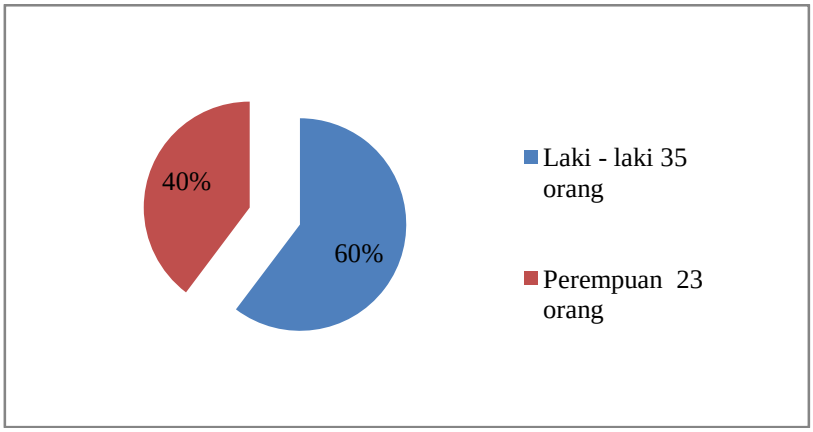
Diagram 3.1
Karakteristik Responden Berdaskan Usia



Sumber : Data primer yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 25 – 35 tahun mendapat persentase 34,4%, 45-55 tahun sebesar 32,75%, < 25 tahun sebesar 11%, dan 36 - 45 sebesar 13,79%. Diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 25 - 35 tahun, karena pada usia 25 - 35 dianggap usia yang sangat matang atau sangat produktif.

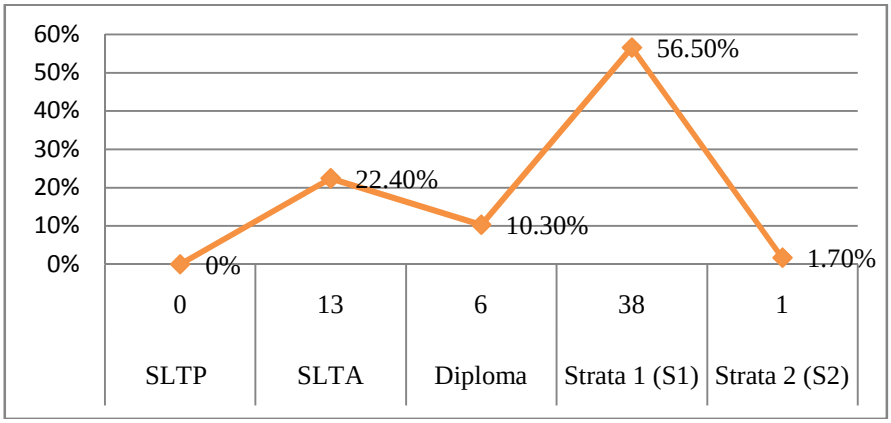
Diagram 3.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : data primer yang telah diolah, 2010.

Berdasarkan tabel dapat dilihat jumlah responden yang mengisi angket berdasarkan jenis kelamin untuk laki-laki sebesar 60,3% dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 39,7%. Disimpulkan mayoritas sebagian aparatur yang bekerja di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat lebih banyak Pria

Diagram 3.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

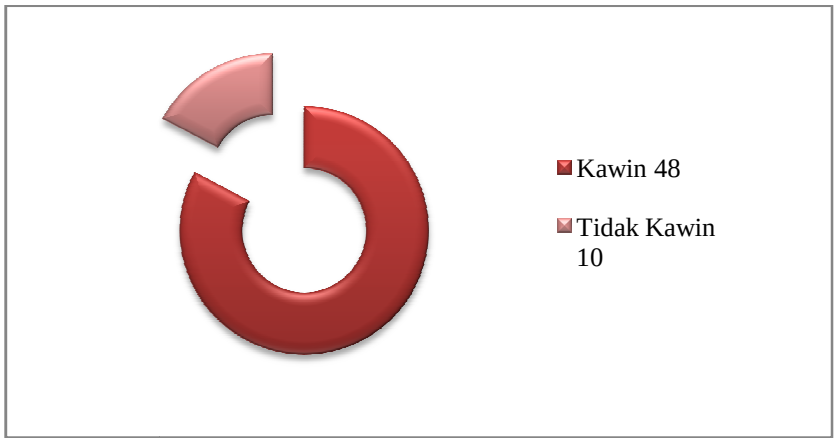


Sumber : data primer yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 56,5% responden, responden dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 22,4% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata

2 (S2) sebanyak 1,7%, Diploma (D3) sebanyak 10,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 1 (S1). Mayoritas aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).

Diagram 3.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan



Sumber : data primer yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dengan status perkawinan kawin sebesar 82,8%, dan tidak kawin sebesar 17,2%. Menunjukan bahwa hasil dari angket penelitian mayoritas pegawai negeri Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berstatus sudah menikah.